

Sepakat Tidak Toleransi Pemecah Belah Bangsa, Demo 4 November Harus Santun

Selasa, 01-11-2016

JAKARTA, MUHAMMADIYAH.OR.ID – Silaturahmi antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, di Istana Merdeka, Jakarta, telah menyepakati bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah final, dan tidak akan ada toleransi terhadap siapa saja yang akan memecah belah bangsa ini..

"Kami sepakat bahwa kita memang siap untuk membela negara dan bagi kami NKRI final, dan kita tidak akan memberikan toleransi kepada siapa saja yang akan memecah-belah bangsa ini," kata Ketua Umum MUI, Ma'ruf Amin, dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta pada Selasa siang (1/11).

Menurut Ma'ruf, dalam pertemuan tersebut, sejumlah pengurus organisasi massa Islam menyampaikan ada kegaduhan yang diakibatkan pernyataan salah satu kepala daerah dengan dugaan penistaan agama.

Ma'ruf menilai, kendati masalah itu tidak berhubungan dengan politik maupun Pilkada yang akan dilaksanakan pada 2017, namun isu itu menjadi berkembang dan menimbulkan keresahan di masyarakat.

"Karena itu kita sepakat semua ini diproses secara terhormat, proporsional, melalui proses hukum. Presiden mengatakan bahwa beliau sudah memerintahkan ini untuk diproses dan beliau tidak akan intervensi terhadap masalah ini," ujar Ma'ruf.

Ketua MUI juga mengatakan sepakat untuk berdemonstrasi sesuai aturan dan akan berlangsung tertib.

Sementara itu terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang digelar serentak di sejumlah daerah, menurut KH. Ma'ruf Amin, baik MUI, NU, dan Muhammadiyah sepakat dengan imbauan Presiden Jokowi, supaya dilakukan dengan damai, supaya dilakukan dengan tidak ada konflik, dan masing-masing calon itu supaya siap untuk menang maupun untuk kalah.

"Sehingga, apabila sudah (selesai Pilkada, red) tidak ada lagi konflik-konflik yang akan terjadi," pungkas Rais Aam PBNU ini.

Mendampingi Ketua Umum MUI saat menyampaikan konperensi pers itu adalah Menko Polhukam Wiranto, dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti.

Sebelumnya, sejumlah ormas Islam berencana melakukan unjuk rasa di Jakarta pada 4 November 2016. Jokowi sebelumnya mengimbau agar unjuk rasa tidak mengganggu ketertiban dan tetap mengutamakan perdamaian. **(dzar)**

Redaktur: Dzar Al Banna

BERITA NASIONAL